



**Ranah Research**

E-ISSN: 2655-0865

**Journal of Multidisciplinary Research and Development**

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i4>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

Desak Gede Susila<sup>1</sup>, I Wayan Suardana<sup>2</sup>, Ni Putu Ratna Sari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pariwisata, Program Magister Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Indonesia  
[susiladesakgede@gmail.com](mailto:susiladesakgede@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Pariwisata, Program Magister Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Indonesia  
[suardana\\_ipw@unud.ac.id](mailto:suardana_ipw@unud.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Pariwisata, Program Magister Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Indonesia  
[ratnasari@unud.ac.id](mailto:ratnasari@unud.ac.id)

Corresponding Author: [susiladesakgede@gmail.com](mailto:susiladesakgede@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study is motivated by the importance of local community participation in community-based tourism development, particularly at the Pura Lempuyang Tourist Attraction in Karangasem Regency, Bali. Although local communities have been involved in various tourism activities, the level of participation and distribution of roles in decision-making remain important issues to be examined. This research aims to analyze the forms of participation, levels of participation, and the impacts of local community participation in the development of tourism at Pura Lempuyang. This study employs a descriptive approach using both qualitative and quantitative data. Data were collected through in-depth interviews, observation, documentation, and questionnaires distributed to local community members. Qualitative data were analyzed thematically using NVivo, while quantitative data were analyzed using a Likert scale based on Arnstein's ladder of participation (1969). The findings indicate that community participation is predominantly characterized as induced participation, with the main involvement occurring in operational and economic aspects of tourism. The level of participation is situated at the degrees of tokenism, particularly at the informing stage, where the community is involved through information dissemination and consultation but has limited influence on decision-making processes. Community participation also generates positive impacts on economic, social and cultural aspects, including increased income, expanded business opportunities, strengthened social interaction, and reinforcement of cultural and religious values. This study concludes that community participation in Pura Lempuyang has developed but still requires strengthening in terms of authority distribution, equitable benefit-sharing, and involvement in strategic planning to ensure more inclusive and sustainable community-based tourism development.*

**Keywords:** *Community participation, community-based tourism, Pura Lempuyang, ladder of participation, tourism impacts.*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas, khususnya di Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang, Kabupaten Karangasem, Bali. Meskipun masyarakat telah terlibat dalam berbagai aktivitas pariwisata, tingkat keterlibatan dan distribusi peran dalam pengambilan keputusan masih menjadi isu yang perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, serta dampak partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata Pura Lempuyang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan kombinasi data kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat lokal. Analisis data kualitatif dilakukan secara tematik dengan bantuan NVivo 14, sedangkan data kuantitatif dianalisis menggunakan skala *Likert* berdasarkan tangga partisipasi Arnstein (1969). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat didominasi oleh *induced participation*, dengan keterlibatan utama pada aspek operasional dan ekonomi pariwisata. Tingkat partisipasi masyarakat berada pada tahap *degrees of tokenism*, khususnya pada tingkat *informing*, di mana masyarakat telah dilibatkan melalui penyampaian informasi dan konsultasi, namun belum memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat juga memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi, sosial dan budaya, seperti peningkatan pendapatan, peluang usaha, interaksi sosial, serta penguatan nilai adat dan religiusitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Pura Lempuyang telah berkembang, namun masih memerlukan penguatan pada aspek distribusi kewenangan, pemerataan manfaat, dan keterlibatan dalam perencanaan strategis agar pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** partisipasi masyarakat, pariwisata berbasis masyarakat, Pura Lempuyang, tangga partisipasi, dampak pariwisata.

---

## PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal di daerah tujuan wisata (*tourist receiving countries*) (Riskayana, 2015). Di Indonesia, Bali menjadi salah satu provinsi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata karena memiliki keindahan alam, budaya, dan tradisi yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Keberhasilan industri pariwisata di Bali tidak terlepas dari keberadaan wisatawan dan pelaku wisata sebagai komponen utama penggerak aktivitas pariwisata. Salah satu wilayah di Bali yang berkembang sebagai destinasi wisata adalah Kabupaten Karangasem yang memiliki potensi wisata budaya, alam, dan spiritual. Kabupaten ini memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari dataran, perbukitan, pantai, hingga kawasan Gunung Agung, yang menjadi daya tarik penting dalam pengembangan pariwisata daerah. Salah satu destinasi yang mengalami perkembangan signifikan di Kabupaten Karangasem adalah Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang.

Pura Lempuyang dikenal sebagai destinasi wisata spiritual dan visual yang populer karena keberadaan *Gates of Heaven* dengan latar Gunung Agung yang menjadi ikon fotografi wisata Bali. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 562/HK/2018 tentang Penetapan *Pilot Project* Desa Wisata Nawa Satya Karangasem “The Spirit of Bali”, Desa Tribuana ditetapkan sebagai bagian dari pengembangan Desa Wisata Purwayu dengan Pura Lempuyang sebagai daya tarik utamanya. Kawasan ini mengintegrasikan potensi wisata spiritual, budaya, dan alam secara berkelanjutan. Popularitas Pura Lempuyang juga diperkuat oleh berbagai ulasan wisatawan pada platform *Tripadvisor* yang menyoroti keindahan panorama alam, suasana sakral, serta pengalaman wisata yang unik meskipun akses menuju lokasi cukup menantang.

Perkembangan Pura Lempuyang terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah kunjungan tercatat sebanyak 84.921 wisatawan, kemudian meningkat menjadi 291.275 wisatawan pada tahun 2022 atau naik sebesar 242,94%. Tahun 2023 jumlah kunjungan kembali meningkat menjadi 344.669 wisatawan atau naik sebesar 18,33%. Namun pada tahun 2024 jumlah kunjungan menurun menjadi 214.269 wisatawan atau turun sebesar 37,83%. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa Pura Lempuyang memiliki dinamika perkembangan yang tinggi dan sensitif terhadap berbagai faktor eksternal maupun kebijakan pengelolaan destinasi. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan destinasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.

Di balik tingginya popularitas Pura Lempuyang, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi masih menjadi persoalan penting. Berdasarkan observasi awal, partisipasi masyarakat lokal cenderung terbatas pada aktivitas operasional seperti penyediaan jasa parkir, transportasi, kuliner, dan pelayanan wisatawan, sementara keterlibatan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi pengelolaan destinasi masih relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan distribusi peran dan manfaat yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan destinasi wisata. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pengembangan *Community-Based Tourism* (CBT) yang berkelanjutan. Ibrahim (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pariwisata sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat lokal.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata juga menjadi bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Widayuni (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pariwisata dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan, memperluas representasi aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan. Partisipasi tidak hanya menjadi bentuk keterlibatan simbolik, tetapi juga mekanisme penyaluran kepentingan publik dan peningkatan kualitas keputusan pembangunan (Center dalam Riskayana, 2015). Tikson (2001) menegaskan bahwa partisipasi merupakan proses keterlibatan masyarakat sebagai *stakeholders* dalam memengaruhi dan mengendalikan pengembangan wilayahnya, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya. Keterlibatan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menegaskan hak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan daerah.

Dalam konteks pengembangan pariwisata, masyarakat dapat terlibat mulai dari tahap persiapan, perencanaan, operasional, pengembangan, hingga pengawasan dan evaluasi destinasi wisata (Kurniawati dkk., 2018). Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat, penelitian ini menggunakan teori *Ladder of Citizen Participation* dari Arnstein (1969) yang membagi partisipasi ke dalam tiga kategori utama, yaitu *Non-participation*, *Tokenism*, dan *Citizen Power*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tipologi partisipasi Tosun (1999) yang mengklasifikasikan partisipasi masyarakat menjadi *spontaneous participation*, *induced participation*, dan *coercive participation*. Kedua teori tersebut digunakan untuk memahami tidak hanya tingkat keterlibatan masyarakat, tetapi juga relasi kekuasaan yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata. Wijana (2019) menemukan bahwa partisipasi masyarakat pada pengembangan wisata di Gianyar berada pada kategori *partnership*, di mana ide dan aspirasi masyarakat telah direspons oleh pemerintah desa. Parmita dkk. (2022) menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Tampaksiring terlibat dalam seluruh tahapan

pengembangan wisata, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Sementara itu, Rismayanti dkk. (2020) menemukan adanya variasi tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan wisata di Desa Sambangan. Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang dengan mengintegrasikan teori partisipasi Arnstein dan Tosun secara bersamaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, tingkat, dan dampak partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang di Desa Tribuana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian partisipasi masyarakat dalam pariwisata serta menjadi masukan praktis bagi pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## Landasan Teori

### Tipologi Partisipasi

Untuk memahami dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk partisipasi tersebut secara sistematis, penelitian ini menggunakan tipologi partisipasi menurut Tosun (1999) sebagai kerangka analitis. Dengan demikian, tipologi tidak diposisikan sebagai objek penelitian, melainkan sebagai perangkat konseptual yang digunakan untuk mengkategorikan dan menafsirkan temuan empiris di lapangan. Tosun (1999) mengembangkan tiga tipologi partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan pariwisata yaitu *spontaneous community participation*, *induced participation* dan *coercive community participation*.

### Tangga Partisipasi (*Ladder of Citizen Participation*)

Partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan sesuai dengan tingkat kekuasaan masyarakat lokal negara dalam menentukan rencana Pengembangan atau program (*corresponding to the extent of citizen's power in determining the plan and/or program*) (Arnstein, 1969).

### Dampak Partisipasi Masyarakat

*Community-Based Tourism* (CBT) menurut Suansri (2003) merupakan pendekatan pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam merancang, mengelola, dan menikmati manfaat dari aktivitas pariwisata. Dalam model ini, partisipasi masyarakat menjadi elemen sentral, yang tidak hanya menjamin keberlanjutan pariwisata, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh komunitas setempat secara merata.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *studi kasus* yang didukung data kuantitatif melalui penyebaran kuesioner skala Likert lima poin untuk memperkuat interpretasi data. Penelitian dilaksanakan di Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, pada Maret–Juli 2025. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Tribuana sebanyak 4.471 jiwa, dengan sampel kuantitatif sebanyak 98 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik *purposive sampling*, sedangkan informan kualitatif dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terkait pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, kuesioner skala Likert, alat perekam, dan dokumentasi, dengan peneliti sebagai *human instrument*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, penyebaran kuesioner, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif

kuantitatif untuk mengolah data kuesioner melalui perhitungan nilai rata-rata (*mean*) dan klasifikasi interval, serta analisis deskriptif kualitatif dan analisis tematik berbantuan perangkat lunak NVivo 14 melalui proses *coding*, kategorisasi tema, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menganalisis bentuk, tingkat, dan dampak partisipasi masyarakat dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang.

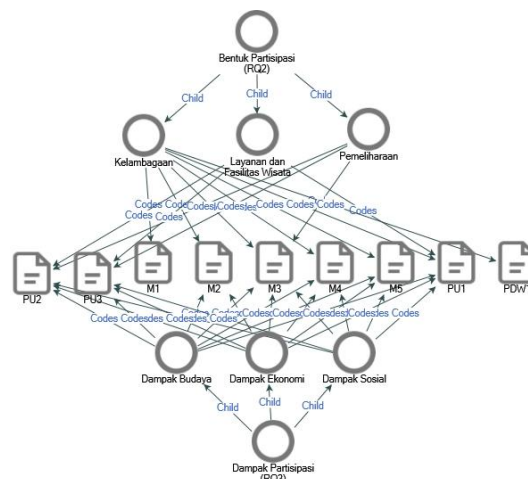
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Partisipasi Masyarakat Lokal

Bentuk partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang dianalisis berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi, yang kemudian diolah menggunakan analisis tematik berbantuan perangkat lunak NVivo 14. Analisis ini mengacu pada tipologi partisipasi menurut Tosun (1999) yang membedakan partisipasi masyarakat menjadi *spontaneous participation*, *induced participation*, dan *coercive participation* sebagai kerangka untuk memahami pola keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkembang dalam beberapa aspek utama, yaitu aspek kelembagaan, pemeliharaan daya tarik wisata, serta layanan dan fasilitas wisata. Ketiga aspek tersebut memperlihatkan bentuk keterlibatan masyarakat yang beragam, mulai dari partisipasi yang terstruktur melalui organisasi lokal hingga partisipasi berbasis nilai sosial dan religius yang tumbuh secara spontan dalam kehidupan masyarakat.

Analisis data kualitatif mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 14. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antar kategori partisipasi yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Melalui proses *coding*, setiap potongan data dikategorikan ke dalam tema-tema yang relevan, sehingga memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai bentuk, tingkat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Hasil analisis ini diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana keterlibatan masyarakat tidak hanya berperan dalam aspek operasional wisata, tetapi juga dalam pelestarian budaya dan penguatan nilai-nilai lokal.



Gambar 1. Visualisasi Hubungan Tema dan Sumber Data dalam NVivo 14

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Model yang ditampilkan pada Gambar 1 di atas menggambarkan hubungan antara bentuk partisipasi masyarakat (RQ2) dengan dampak partisipasi (RQ3) berdasarkan hasil pengkodean data wawancara. Secara umum, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata teridentifikasi melalui beberapa bentuk utama, yaitu peran kelembagaan, keterlibatan dalam penyediaan layanan dan fasilitas wisata, serta aktivitas pemeliharaan.

Bentuk-bentuk partisipasi ini muncul dari proses koding terhadap berbagai sumber wawancara yang ditunjukkan oleh file (PU, M, dan PDW), yang menjadi dasar bukti empiris penelitian.

Partisipasi masyarakat tersebut tidak berhenti hanya pada keterlibatan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata yang dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu dampak budaya, dampak ekonomi, dan dampak sosial. Dampak budaya tercermin dari kontribusi masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai tradisi, adat, serta menjaga identitas lokal di tengah perkembangan pariwisata. Dampak ekonomi muncul melalui bertambahnya peluang kerja, peningkatan penghasilan, serta dukungan terhadap tumbuhnya usaha lokal dan UMKM. Sementara itu, dampak sosial terlihat dari meningkatnya interaksi sosial, solidaritas antarwarga, serta tumbuhnya kesadaran kolektif dalam mengelola dan menjaga keberlanjutan destinasi wisata.

Data tersebut diklasifikasikan ke dalam berbagai tema yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga memudahkan identifikasi pola dan tren yang muncul dari jawaban informan. Tabel berikut menyajikan jumlah data yang terkoding dalam masing-masing tema, memberikan gambaran awal mengenai distribusi dan intensitas munculnya setiap tema dalam analisis kualitatif ini. Berikut adalah tabel yang menyajikan jumlah data yang terkoding dalam masing-masing tema yang ditampilkan pada Tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1. Jumlah Data yang Terkoding dalam Tema**

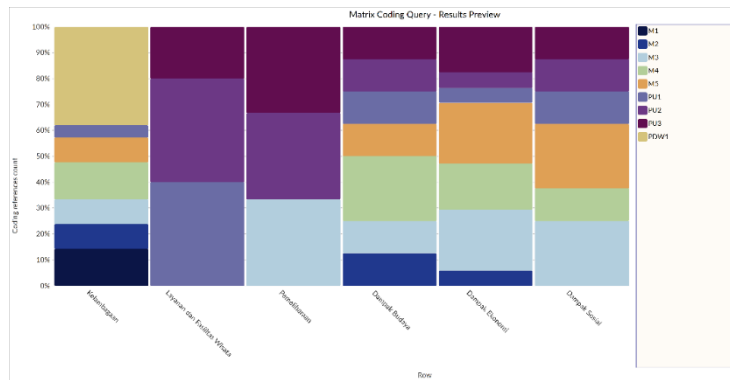
Tema	Jumlah Data	Persentase
<b>A. Bentuk Partisipasi (RQ2)</b>		
1. Kelambagaan	21	33.87%
2. Layanan dan Fasilitas Wisata	5	8.06%
3. Pemeliharaan	3	4.84%
<b>B. Dampak Partisipasi (RQ3)</b>		
4. Dampak Budaya	8	12.90%
5. Dampak Ekonomi	17	27.42%
6. Dampak Sosial	8	12.90%
<b>Total</b>	<b>62</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

Tabel di atas menunjukkan jumlah data yang terkoding dalam masing-masing tema terkait partisipasi masyarakat di Pura Lempuyang. Tema pertama, yaitu Bentuk Partisipasi (RQ2), mengidentifikasi jenis-jenis keterlibatan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa bentuk partisipasi yang paling dominan adalah kelembagaan, dengan 21 data atau 33,87%, yang mencerminkan peran penting struktur dan lembaga masyarakat dalam mendukung kegiatan pariwisata. Bentuk partisipasi lainnya, seperti layanan dan fasilitas wisata serta pemeliharaan, memiliki jumlah data yang lebih kecil, masing-masing sebesar 5 data (8,06%) dan 3 data (4,84%), menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam operasional harian dan pemeliharaan daya tarik wisata relatif lebih terbatas.

Tema kedua, yaitu Dampak Partisipasi (RQ3), menyoroti efek keterlibatan masyarakat terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Dampak ekonomi menjadi yang paling signifikan dengan 17 data atau 27,42%, menunjukkan kontribusi partisipasi masyarakat terhadap peningkatan pendapatan, peluang usaha, dan aktivitas ekonomi lokal. Sementara itu, dampak budaya dan dampak sosial masing-masing memiliki 8 data atau 12,90%, menandakan adanya efek positif terhadap pelestarian nilai budaya, kegiatan adat, dan interaksi sosial antarwarga maupun dengan wisatawan.

*Chart* berikut memberikan ilustrasi yang lebih jelas mengenai intensitas kemunculan setiap tema dalam penelitian ini, sekaligus menunjukkan jumlah kode dan sumber kode yang terkait dengan masing-masing tema, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat tema mana yang paling banyak dikaitkan dengan data dan responden. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut.



**Gambar 2. Visualisasi dari Persentasi Matrix Coding Query NVivo 14**  
 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

Sajian ini memperlihatkan proporsi kode yang terkait dengan setiap tema pada penelitian, sekaligus menunjukkan kontribusi masing-masing sumber kode terhadap tema tersebut. Sumbu horizontal menunjukkan tema-tema penelitian, seperti bentuk partisipasi (kegiatan ekonomi kreatif, kelembagaan, layanan dan fasilitas wisata, pelestarian adat dan budaya, pemeliharaan) dan dampak partisipasi (dampak budaya, ekonomi, sosial). Sumbu vertikal menunjukkan persentase atau jumlah kode yang ditemukan untuk setiap tema.

Setiap warna dalam batang mewakili sumber kode berbeda, yang memungkinkan peneliti melihat tema mana yang paling banyak dikaitkan dengan responden tertentu. Misalnya, batang dengan dominasi warna ungu menunjukkan bahwa sebagian besar kode untuk tema tersebut berasal dari sumber PU3, sedangkan warna lain menandakan kontribusi sumber kode lainnya. Untuk memahami pola penggunaan kata dalam data penelitian ini, dilakukan analisis frekuensi kata (*word frequency*).

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kata-kata yang paling sering muncul, sehingga memberikan gambaran awal mengenai tema dan fokus utama dalam data. *Chart* berikut akan menyajikan kata-kata yang paling dominan, beserta jumlah kemunculannya, sehingga memudahkan dalam interpretasi dan penelusuran lebih lanjut terhadap konteks dan makna yang terkandung, seperti yang ditampilkan oleh gambar di bawah ini.



**Gambar 3. Word Frequency Query terkait Bentuk Partisipasi Masyarakat**  
 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

Visualisasi *word frequency* yang ditampilkan pada Gambar 3 di atas, dapat dilihat bahwa beberapa kata menonjol yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat di Pura Lempuyang seperti ‘banjar’, ‘adat’, ‘masyarakat lokal’, ‘pemandu’, ‘kegiatan’, ‘bersih’, dan ‘pariwisata’. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga nyata dalam berbagai aktivitas. Misalnya, masyarakat lokal dan anggota banjar dinas terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan pariwisata, termasuk menjadi pemandu, menjaga kebersihan, serta mengatur tata kelola adat.

Hasil analisis NVivo menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Pura Lempuyang berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlibatan langsung dalam kegiatan ekonomi

kreatif, pengelolaan jasa transportasi dan tiket, hingga peran dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan daya tarik wisata. Meskipun tidak seluruh masyarakat lokal secara aktif terlibat, sebagian besar partisipasi berada pada tingkat kemitraan dan pendelegasian wewenang, yang menandakan adanya bentuk partisipasi terinduksi, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyuarakan kepentingan dan mempengaruhi pengelolaan pariwisata.

Hasil analisis data kualitatif menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Pura Lempuyang didominasi oleh *induced participation*, yaitu keterlibatan masyarakat yang berlangsung dalam kerangka kelembagaan dan struktur pengelolaan yang telah ditetapkan. Partisipasi tersebut tampak terutama pada keterlibatan masyarakat dalam aktivitas operasional wisata, seperti pemandu wisata, penyedia jasa transportasi, pengelola parkir, serta pelaku usaha kuliner dan penjualan souvenir. Bentuk partisipasi ini bersifat fungsional dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

Namun demikian, partisipasi tersebut tidak terdistribusi secara merata di seluruh masyarakat Desa Tribuana. Keterlibatan yang paling aktif dan terstruktur berasal dari masyarakat Banjar Dinas Purwayu sebagai pengelola utama Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang. Hampir seluruh posisi strategis, khususnya dalam organisasi pemandu wisata (*Sekaa*), diisi oleh masyarakat dari banjar tersebut. Hampir seluruh posisi strategis, khususnya dalam organisasi pemandu wisata (*Sekaa*), diisi oleh masyarakat Banjar Dinas Purwayu, sementara masyarakat dari banjar dinas lain cenderung terlibat pada peran pendukung seperti supir Elf. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan akses kelembagaan bagi sebagian masyarakat dalam proses pengelolaan wisata.

Lebih rinci bagaimana bentuk partisipasi masyarakat tersebut berlangsung dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang, analisis selanjutnya diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu:

### **Partisipasi dalam Aspek Kelembagaan**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta analisis tematik menggunakan NVivo, terlihat bahwa bentuk partisipasi masyarakat bersifat berlapis dan tidak merata antar banjar. Partisipasi paling aktif berasal dari Banjar Dinas Purwayu, di mana sebagian besar masyarakat terlibat dalam kegiatan operasional sebagai pemandu wisata. Sementara itu, masyarakat dari banjar lain cenderung terlibat pada peran pendukung seperti sopir Elf. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan keterlibatan formal masyarakat di luar Banjar Dinas Purwayu, yang sebagian besar hanya menerima informasi tanpa memiliki ruang dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan wisata.

Secara kelembagaan, pengelolaan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang berada di bawah kewenangan Banjar Dinas Purwayu setelah desa dinas menyerahkan pengelolaan kepada banjar tersebut. Masyarakat yang tergabung dalam organisasi pemandu wisata memperoleh gaji yang dikelola oleh Banjar Dinas Purwayu. Sementara itu, masyarakat di luar organisasi pemandu, seperti penjaga warung, penyedia jasa ojek, dan pedagang souvenir, tetap memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan daya tarik wisata tanpa dikenakan pajak atau iuran wajib kepada banjar, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi milik pribadi.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan operasional wisata Pura Lempuyang sangat terstruktur melalui organisasi pemandu (*Sekaa*). Anggota *Sekaa* dibagi dalam *shift* pagi dan sore dengan tugas yang dirotasi, mulai dari pengelolaan tiket, parkir, penggunaan sarung/kamben, hingga edukasi wisatawan. Selain itu, calon pemandu mengikuti pelatihan formal selama tiga bulan, yang mencakup kemampuan bahasa, sikap, dan keluwesan berinteraksi dengan wisatawan, sebelum dinyatakan layak menjadi anggota resmi. Model ini menunjukkan adanya partisipasi berbasis keterampilan dan pembagian peran yang jelas, di mana masyarakat yang bersedia dan memiliki minat tinggi dapat menempati posisi strategis dalam pengelolaan wisata. Berkaitan dengan hal tersebut, seperti yang disampaikan oleh Informan PDW1, sebagai berikut:

*“Tugas utama kami yaitu memberikan pelatihan/edukasi kepada calon anggota pemandu yang di-training selama 3 bulan. Setelah lulus tes baru dinyatakan resmi lulus menjadi anggota pemandu wisata di Pura Lempuyang”*

*(Wawancara, 18 Juli 2025)*

Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat yang tergabung dalam organisasi memiliki pembagian tugas yang teratur, seperti yang dijelaskan oleh Informan PDW1 sebagai berikut:

*“Disini masyarakat yang tergabung menjadi satu organisasi pemandu dengan nama Sekaa Pemandu Badra Karma, tugas pemandu biasanya di-rolling jadi hari ini bisa di bagian pemakaian sarung/kamben besoknya bisa di penjualan tiket.”*

*(Wawancara, 18 Juli 2025)*

Tidak semua masyarakat Desa Tribuana terlibat secara langsung dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang melalui jalur kelembagaan formal. Sebagian masyarakat hanya berperan sebagai penyedia jasa individual atau terlibat dalam kegiatan rutin seperti gotong royong, tanpa keterlibatan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan strategis. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan M4 sebagai berikut:

*“Pernah terlibat hanya dalam gotong royong bersih-bersih jalan dan pura. Tapi untuk perencanaan besar atau pembagian peluang usaha, saya tidak pernah dilibatkan.”*

*(Wawancara, 18 Juli 2025)*

Informan menegaskan keterlibatannya hanya dalam aktivitas kolektif bersifat rutin, misalnya bersih-bersih jalan dan pura, yang lebih mencerminkan bentuk partisipasi simbolis atau sekadar pelibatan tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi akses dan peran masyarakat, di mana hanya segelintir pihak yang mendapatkan ruang dalam pengambilan keputusan strategis, sementara sebagian lainnya terpinggirkan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi akses dan peran masyarakat, di mana hanya kelompok tertentu yang memiliki ruang dalam pengambilan keputusan strategis, sementara sebagian masyarakat lainnya berada pada posisi pelaksana. Perencanaan dan pengembangan wisata di Pura Lempuyang pada praktiknya dibahas dalam forum paruman yang diselenggarakan oleh Banjar Dinas Purwayu sebagai pengelola utama. Forum ini menjadi ruang komunikasi internal dalam merumuskan rencana kegiatan dan pengambilan keputusan, sementara hasilnya kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bentuk koordinasi, tanpa melibatkan secara langsung banjar lain dalam proses perencanaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap proses perencanaan masih bersifat terbatas dan terpusat pada kelompok tertentu. Keterlibatan masyarakat umumnya terjadi pada level operasional dan kegiatan rutin, seperti gotong royong dan aktivitas keagamaan, sedangkan dalam perencanaan strategis ruang partisipasi masih belum merata.

Struktur kelembagaan yang demikian mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang belum terdistribusi secara merata dan cenderung bersifat parsial. Bentuk partisipasi yang terbangun lebih bersifat instruktif dan konsultatif, serta belum sepenuhnya mencapai tingkat kemitraan maupun pemberdayaan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme kelembagaan yang lebih inklusif dengan melibatkan seluruh banjar agar pengelolaan Pura Lempuyang dapat memberikan manfaat yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

## Partisipasi dalam Pemeliharaan Daya Tari Wisata Pura Lempuyang

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta analisis tematik menggunakan NVivo, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan daya tarik wisata Pura Lempuyang terlihat dari keterlibatan mereka dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kawasan pura. Masyarakat setempat secara bergilir melakukan kegiatan gotong royong, seperti membersihkan area jalan menuju pura, merapikan fasilitas umum, dan mengelola sampah agar tidak menumpuk.

Kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung aktivitas pariwisata, tetapi juga merupakan bagian dari rutinitas persiapan menjelang hari-hari besar keagamaan, ketika intensitas kunjungan umat dan aktivitas ritual meningkat. Praktik ini mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat bahwa kebersihan dan kenyamanan kawasan pura merupakan tanggung jawab bersama, baik dalam konteks keagamaan maupun pariwisata.

Selain kebersihan, bentuk partisipasi masyarakat juga terlihat dalam peran mereka menjaga keaslian dan kesakralan pura sebagai pusat spiritual. Masyarakat adat bersama pengempon pura aktif mengatur tata cara kunjungan, memberikan edukasi kepada wisatawan terkait aturan berkunjung, serta mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran norma kesopanan dan adat istiadat. Hal ini menegaskan bahwa pemeliharaan daya tarik wisata tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga dimensi kultural dan spiritual yang menjadi identitas utama Pura Lempuyang.

Lebih lanjut, masyarakat juga berperan dalam pemeliharaan fasilitas pendukung yang menunjang pengalaman wisatawan. Beberapa masyarakat terlibat dalam perbaikan jalan akses, perawatan area parkir, serta pengelolaan warung atau kios dengan memperhatikan kenyamanan pengunjung. Partisipasi ini menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap daya tarik wisata, karena masyarakat menyadari bahwa keberlanjutan Pura Lempuyang tidak hanya berdampak pada manfaat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan menjaga kesakralan pura serta nama baik desa sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan hal itu, disampaikan oleh Informan PU2 sebagai berikut:

*“Ada, tapi masih sederhana. Biasanya kalau ada hari besar seperti odalan, galungan, kuningan dan lainnya, kita gotong royong bersih-bersih, atur parkir, atau rapat koordinasi soal pedagang.”*

*(Wawancara, 18 Juli 2025)*

Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan Pura Lempuyang umumnya terwujud melalui aktivitas kolektif seperti gotong royong membersihkan lingkungan, perbaikan fasilitas pura, dan kegiatan rutin lainnya. Bentuk keterlibatan ini mencerminkan kuatnya nilai kebersamaan dan solidaritas sosial, sekaligus menjadi ruang partisipasi yang paling mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, partisipasi tersebut masih terbatas pada aspek pelaksanaan teknis dan belum menyentuh ranah perencanaan strategis maupun pengambilan keputusan dalam pengembangan pariwisata.

Keterlibatan masyarakat melalui gotong royong juga menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap Pura Lempuyang sebagai pusat aktivitas spiritual sekaligus daya tarik wisata. Partisipasi ini berakar kuat pada nilai-nilai religius yang telah diwariskan secara turun-temurun, di mana perawatan pura dipandang sebagai bentuk dharma bakti kepada leluhur dan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan kesakralan pura tidak semata-mata didorong oleh kepentingan pariwisata, melainkan oleh kewajiban moral dan spiritual yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Secara tidak langsung, komitmen religius tersebut memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang. Lingkungan pura yang bersih, terawat, dan aktif secara ritual memperkuat nilai autentik yang dirasakan wisatawan, baik dari

sisi budaya maupun spiritual. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan Pura Lempuyang sebagai destinasi wisata tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan formal, tetapi juga pada kesadaran religius masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara fungsi sakral pura dan nilai ekonomisnya sebagai daya tarik wisata.

### **Partisipasi dalam Layanan dan Fasilitas Wisata**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta analisis tematik menggunakan NVivo, partisipasi masyarakat dalam layanan dan fasilitas wisata di Pura Lempuyang terlihat melalui penyediaan berbagai fasilitas pendukung, seperti pengelolaan area parkir, penyediaan toilet umum, penyewaan perlengkapan sembahyang dan kain adat, serta layanan pendukung lainnya. Keberadaan fasilitas tersebut berperan penting dalam menunjang kenyamanan wisatawan sekaligus memastikan aktivitas pariwisata tetap selaras dengan nilai adat dan spiritual yang berlaku di kawasan pura.

Namun, pada praktiknya, keterlibatan aktif dalam penyediaan layanan dan pengelolaan fasilitas inti didominasi oleh masyarakat Banjar Dinas Purwayu sebagai pengelola utama daya tarik wisata. Sementara itu, masyarakat dari banjar dinas lainnya relatif tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan layanan utama, sehingga partisipasi dalam sektor ini belum terdistribusi secara merata di tingkat desa.

Seiring berkembangnya Pura Lempuyang sebagai daya tarik wisata populer, partisipasi masyarakat Banjar Dinas Purwayu dalam layanan wisata semakin beragam. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pedagang makanan dan minuman, tetapi juga menyediakan jasa transportasi lokal, penyewaan pakaian adat, layanan fotografi, hingga pemandu wisata. Seperti yang disampaikan oleh Informan PU2 sebagai berikut:

*“Banyak masyarakat sekarang ikut terlibat, ada yang jualan, jadi sopir, fotografer, atau menyewakan pakaian adat untuk foto, Ada juga yang bantu urus parkir atau jadi pemandu wisata”*

*(Wawancara, 18 Juli 2025)*

Sebelum pariwisata berkembang pesat, aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Pura Lempuyang masih bersifat sederhana, seperti berdagang makanan dan minuman, tukang suun, serta ojek tradisional. Jenis pekerjaan tersebut masih bersifat lokal dan terbatas, namun sudah mencerminkan adanya interaksi awal antara masyarakat dan orang luar yang berkunjung ke kawasan pura. Hal ini menjadi fondasi penting bagi masyarakat untuk beradaptasi ketika pariwisata kemudian berkembang lebih pesat. Sejalan dengan hal tersebut, Informan PU1 menjelaskan:

*“Sebelum terkenal Pura Lempuyang ini ada beberapa jenis pekerjaan disini seperti pedagang makanan dan minuman, tukang suun (jasa mengangkut barang dagangan), dan ojek tradisional. Kalau sekarang sudah banyak berkembang seperti ada penambahan pekerjaan menjadi tukang parkir, jadi guide, penjaga tiket, ada yang menjaga ada tempat wisata lainnya juga.”*

*(Wawancara, 18 Juli 2025)*

Perkembangan pariwisata kemudian mendorong diversifikasi pekerjaan, dengan munculnya berbagai layanan baru seperti pengelola parkir, penjaga tiket, dan pemandu wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata telah membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat dan menjadi sumber pendapatan alternatif di luar sektor tradisional. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam layanan dan fasilitas wisata di Pura Lempuyang mencerminkan partisipasi aktif pada level operasional dan ekonomi, namun masih terbatas pada kelompok tertentu. Meskipun keterlibatan ini berkontribusi positif terhadap kualitas layanan dan

kepuasan wisatawan, keterbatasan akses bagi banjar lain menunjukkan perlunya pengelolaan layanan yang lebih inklusif agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Desa Tribuana.

Berdasarkan klasifikasi partisipasi menurut Tosun (1999), bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang menunjukkan dominasi *induced participation*. Keterlibatan masyarakat berlangsung dalam kerangka kelembagaan yaiyang telah ditetapkan, seperti melalui organisasi atau Sekaa pemandu wisata, pembagian peran operasional, serta mekanisme pelatihan dan pengelolaan kegiatan wisata yang terstruktur.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wardana & Adikampana (2018) di Desa Wisata Jatiluwih yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata masih bersifat terbatas pada tahap pelaksanaan. Meskipun masyarakat dilibatkan dan pendapat mereka didengar, pengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis masih relatif kecil. Namun demikian, masyarakat tetap merasakan manfaat ekonomi dari perkembangan pariwisata di wilayah tersebut. Kondisi ini memiliki kemiripan dengan temuan di Pura Lempuyang, di mana masyarakat terlibat dalam kegiatan operasional dan memperoleh manfaat ekonomi, tetapi ruang pengaruh dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih terbatas.

Selain itu, hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Aulia dkk. (2024) di Desa Timusu yang menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat didominasi oleh *induced participation*, yaitu partisipasi yang terjadi karena adanya arahan atau dorongan dari pemerintah desa maupun pihak pengelola. Partisipasi spontan masyarakat dalam penelitian tersebut masih relatif terbatas, sehingga diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih inklusif. Temuan ini memperkuat hasil penelitian di Pura Lempuyang, di mana partisipasi masyarakat juga berkembang dalam kerangka yang terstruktur dan terinduksi, sementara partisipasi spontan lebih banyak muncul pada kegiatan adat dan pemeliharaan pura yang berlandaskan nilai religius.

Di sisi lain, *spontaneous participation* tampak pada aktivitas pemeliharaan pura dan kegiatan gotong royong yang berakar pada nilai religius dan adat, yang dilakukan tanpa dorongan langsung dari pengelolaan pariwisata. Sementara itu, bentuk *coercive participation* tidak ditemukan secara eksplisit, meskipun terdapat kecenderungan partisipasi yang bersifat elitis, di mana masyarakat dari banjar lain memiliki akses yang terbatas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat di Pura Lempuyang bersifat terstruktur, terinduksi, dan belum sepenuhnya inklusif.

Secara keseluruhan, pola partisipasi masyarakat di Pura Lempuyang menunjukkan kecenderungan yang serupa dengan berbagai studi pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia, yaitu partisipasi yang didominasi oleh dorongan kelembagaan, manfaat ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat, namun belum sepenuhnya diikuti dengan keterlibatan yang kuat dalam pengambilan keputusan strategis.

### **Tingkat Partisipasi Masyarakat Lokal**

Tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Desa Tribuana. Analisis dilakukan dengan mengacu pada tangga partisipasi Arnstein (1969) yang membagi partisipasi ke dalam tiga tingkat utama, yaitu *Non-Participation*, *Degrees Of Tokenism*, dan *Degrees of Citizen Power*.

Hasil pengolahan data skala *Likert* menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada spektrum yang beragam, mulai dari keterlibatan yang masih bersifat simbolis hingga indikasi awal menuju pembagian peran dan kewenangan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, hasil kuantitatif tersebut kemudian diperkuat melalui temuan wawancara dan observasi lapangan serta dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang relevan.

Tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang diukur melalui analisis deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert lima poin kepada 98 responden masyarakat Desa Tribuana yang berasal dari lima banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Purwayu, Banjar Dinas Ngis Kaler, Banjar Dinas Ngis Kelod, Banjar Dinas Basangalas Kawan, dan Banjar Dinas Basangalas Kangin.

Sebagian besar responden berasal dari Banjar Dinas Purwayu, yang merupakan banjar terdekat dengan kawasan Pura Lempuyang dan memiliki intensitas keterlibatan paling tinggi dalam aktivitas pariwisata. Sementara itu, responden dari banjar dinas lainnya jumlahnya relatif terbatas, sejalan dengan tingkat keterlibatan yang lebih rendah dalam pengelolaan dan layanan pariwisata di kawasan tersebut.

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai sejauh mana masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan pariwisata, seperti pelayanan wisatawan, pengelolaan fasilitas pendukung, jasa transportasi, serta pelestarian nilai-nilai adat. Paragraf ini menjadi landasan sebelum pemaparan hasil analisis skala *Likert* yang mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat pada masing-masing indikator, sekaligus menjelaskan mengapa tingkat partisipasi yang terukur lebih merepresentasikan pengalaman dan keterlibatan masyarakat Banjar Dinas Purwayu dibandingkan banjar dinas lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berdasarkan model *Ladder of Citizen Participation*, diperoleh tiga dimensi besar, yaitu *Non-Participation*, *Degrees of Tokenism*, dan *Degrees of Citizen Power*. Penilaian responden terhadap variabel ini diukur dengan skor terendah 1 untuk jawaban sangat tidak setuju dan tertinggi 5 untuk jawaban sangat setuju. Untuk mendeskripsikan jawaban variabel dapat ditunjukkan dengan nilai rata-rata variabel.

### Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tangga *Non-Participation*

Tabel 2. Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Tingkat *Non-Participation*

Dimensi	No	Variabel Tangga Partisipasi Masyarakat	Rerata Skor	Rerata Skor Likert
		Pernyataan		
<i>Non-Participation: Manipulasi (Manipulation) dan Terapi (Therapy)</i>	1	Saya merasa dilibatkan dalam kegiatan pariwisata hanya sebagai formalitas tanpa diberi peran nyata.	3.07	3.36
	2	Kegiatan yang melibatkan masyarakat lebih bertujuan untuk mendapatkan legitimasi, bukan untuk mendengar aspirasi kami.	3.50	
	3	Kegiatan pembinaan atau sosialisasi pariwisata lebih banyak diarahkan untuk mengubah sikap masyarakat, bukan memberdayakan kami.	3.30	
	4	Program yang dilakukan oleh pihak luar lebih fokus pada memperbaiki perilaku masyarakat daripada mendengar kebutuhan kami.	3.55	

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil kuesioner, dimensi *non-participation* memperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,36, yang berada pada kategori cukup. Hasil ini menunjukkan bahwa responden tidak sepenuhnya memandang pelibatan masyarakat bersifat manipulatif secara ekstrem, namun terdapat kecenderungan bahwa sebagian proses partisipasi masih berlangsung secara terbatas dan bersifat simbolik.

#### a. Manipulation

Pertanyaan pertama pada indikator *manipulation* diperoleh skor rata-rata 3,07 yang berada dalam kategori cukup. Nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menolak maupun menyetujui pernyataan tersebut, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa

sebagian masyarakat masih merasakan keterlibatan yang bersifat terbatas, namun belum cukup kuat untuk dikategorikan sebagai pengalaman yang sepenuhnya formalistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pariwisata, sebagian responden belum sepenuhnya merasakan adanya peran substantif dalam proses tersebut.

Selanjutnya pernyataan kedua memperoleh skor rata-rata 3,50 yang termasuk dalam kategori setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat relatif sepakat bahwa pelibatan yang dilakukan masih cenderung berorientasi pada legitimasi pengelolaan dibandingkan sebagai sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat secara mendalam. Hasil ini menguatkan indikasi bahwa partisipasi masyarakat masih digunakan sebagai sarana pembenaran terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh pengelola, sehingga ruang pengaruh masyarakat terhadap arah kebijakan relatif terbatas.

### b. Therapy

Selanjutnya, pernyataan ketiga dan keempat yang berkaitan dengan indikator *Therapy*, sosialisasi, serta program yang dilakukan oleh pihak luar masing-masing memperoleh skor rata-rata 3,30 dan 3,55. Skor 3,30 berada pada kategori cukup, sedangkan skor 3,55 termasuk dalam kategori setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai sebagian kegiatan pariwisata masih diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat, serta pada beberapa aspek mencerminkan pendekatan yang bersifat *top-down*. Masyarakat lebih diposisikan sebagai pihak yang perlu diarahkan dan disesuaikan perilakunya, bukan sebagai subjek yang memiliki ruang kritis dalam menyampaikan pandangan atau memengaruhi kebijakan secara langsung.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa keterlibatan mereka dalam kegiatan pariwisata masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya memberikan ruang pengaruh dalam pengambilan keputusan. Seperti yang disampaikan oleh Informan M1 sebagai berikut:

*“Kami memang dilibatkan dalam beberapa kegiatan atau pertemuan terkait pariwisata, tetapi biasanya hanya sebatas mendengarkan atau mengikuti arahan. Keputusan tetap ditentukan oleh Banjar Purwayu, kami hanya mengikuti saja”*

*(Wawancara, 18 Juli 2025)*

Pernyataan informan tersebut memperkuat temuan kuesioner bahwa keterlibatan masyarakat masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya memberikan ruang pengaruh dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, adanya beberapa indikator yang berada pada kategori setuju menunjukkan bahwa praktik partisipasi yang bersifat *manipulation* dan *therapy* masih dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, pelibatan masyarakat dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang belum sepenuhnya bersifat memberdayakan dan masih menunjukkan karakteristik *non-participation* sebagaimana dikemukakan dalam tangga partisipasi Arnstein.

## Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tangga *Degress of Tokenism*

Tabel 3. Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Tingkat *Degress of Tokenism*

Dimensi	No	Variabel Tangga Partisipasi Masyarakat	Rerata Skor	Rerata Skor Likert
		Pernyataan		
<i>Degress of Tokenism: Penyampaian</i>	1	Saya hanya menerima informasi tentang kebijakan atau rencana pengembangan pariwisata tanpa dilibatkan dalam prosesnya.	4.04	3.89

Dimensi	No	Variabel Tangga Partisipasi Masyarakat	Rerata Skor	Rerata Skor Likert
		Pernyataan		
Informasi ( <i>Informing</i> ), Konsultasi ( <i>Consultation</i> ) dan peredaman kemarahan ( <i>Placation</i> )	2	Informasi yang saya terima tentang kegiatan pariwisata cenderung satu arah dan tidak memberi ruang untuk berdiskusi.	4.11	
	3	Saya pernah dimintai pendapat atau masukan mengenai pengembangan pariwisata, tetapi tidak tahu apakah itu benar-benar digunakan.	3.84	
	4	Pemerintah atau pengelola pariwisata mengadakan pertemuan untuk mendengar pendapat masyarakat, tetapi keputusan tetap ditentukan oleh mereka.	3.81	
	5	Masyarakat diberi kesempatan duduk dalam pertemuan perencanaan pariwisata, tetapi tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan.	3.70	
	6	Saya merasa dilibatkan dalam forum pengambilan keputusan, tetapi lebih sebagai simbol keterlibatan daripada pemilik suara nyata.	3.86	

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil kuesioner, dimensi *Degrees of Tokenism* memperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,89 yang berada pada kategori setuju. Nilai ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang telah melampaui tahap *non-participation*, namun masih berada pada tingkat partisipasi semu, di mana masyarakat dilibatkan secara prosedural tanpa memiliki kewenangan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini mencerminkan adanya ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi keputusan akhir tetap berada pada pihak pengelola yaitu di Banjar Dinas Purwayu.

**a. Informing**

Indikator *Informing* menunjukkan sejauh mana masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan dan kegiatan pariwisata tanpa keterlibatan dalam proses perumusannya. Pernyataan mengenai masyarakat yang hanya menerima informasi tanpa dilibatkan dalam proses pengembangan memperoleh skor rata-rata 4,04. Sementara itu, pernyataan mengenai informasi yang bersifat satu arah memperoleh skor rata-rata 4,11.

Nilai yang relatif tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima informasi daripada sebagai pihak yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Proses komunikasi yang berlangsung masih bersifat *top-down*, sehingga ruang dialog dan negosiasi belum terbentuk secara optimal. Masyarakat berada pada posisi sebagai penerima informasi, tanpa memiliki ruang yang memadai untuk memengaruhi isi maupun arah kebijakan yang disampaikan.

**b. Consultation**

Indikator *consultation* menggambarkan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau masukan. Pernyataan mengenai pengalaman masyarakat dimintai pendapat memperoleh skor rata-rata 3,84, sedangkan pernyataan mengenai pertemuan yang diadakan untuk mendengar aspirasi masyarakat memperoleh skor 3,81.

Hasil ini menunjukkan bahwa proses konsultasi telah dilakukan, namun belum diikuti dengan keterlibatan nyata dalam pengambilan keputusan. Aspirasi masyarakat belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan, sehingga peran masyarakat masih berada pada posisi sebagai pemberi masukan, bukan sebagai pengambil keputusan.

**c. Placation**

Indikator *placation* berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan tanpa diiringi dengan kewenangan substantif. Pernyataan mengenai kesempatan masyarakat

untuk hadir dalam forum perencanaan memperoleh skor rata-rata 3,70, sedangkan pernyataan mengenai keterlibatan yang lebih bersifat simbolis memperoleh skor 3,86.

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah diberi ruang untuk terlibat secara formal, namun posisi tawar mereka masih terbatas. Keterlibatan tersebut belum mencerminkan pembagian kekuasaan yang setara antara masyarakat dan pengelola.

Secara keseluruhan, rerata skor *Likert* pada dimensi *Degrees of Tokenism* sebesar 3,89 berada pada kategori setuju. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasakan keterlibatan yang lebih banyak berupa penerimaan informasi dan mengikuti arahan yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Informan M1 sebagai berikut:

*“Kami biasanya hanya diberi informasi tentang rencana atau kegiatan pariwisata. Kadang memang ada pertemuan dan kami diminta menyampaikan pendapat, tetapi kadang keputusan sudah ada saat paruman antar pemnadu wisata di Pura Lempuyang. Jadi kami lebih banyak mendengar dan mengikuti saja.”*

*(Wawancara, 18 Juli 2025)*

Pernyataan tersebut memperkuat hasil kuesioner bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih didominasi oleh penyampaian informasi, sementara ruang pengaruh dalam pengambilan keputusan relatif terbatas. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang berada pada tangga *Informing* dalam teori tangga partisipasi Arnstein (1969), yang termasuk dalam kategori *Degrees of Tokenism*.

Hal ini ditunjukkan oleh dominannya peran masyarakat sebagai penerima informasi, dengan proses komunikasi yang masih bersifat satu arah dan *top-down*. Meskipun masyarakat telah diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat melalui forum konsultasi, namun keterlibatan tersebut belum diikuti dengan kewenangan nyata dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat pada tahap ini belum sepenuhnya bersifat memberdayakan, karena masyarakat masih berada pada posisi sebagai penerima informasi dan belum memiliki kontrol terhadap arah kebijakan dalam pengembangan pariwisata.

### Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tangga *Degree of Citizen Power*

**Tabel 4. Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Tingkat *Degrees of Tokenism***

Dimensi	No	Variabel Tangga Partisipasi Masyarakat		Rerata Skor	Rerata Skor Likert
			Pernyataan		
<i>Degree of Citizen Power</i> , meliputi kemitraan ( <i>Partnership</i> ), Pendelegasian kekuasaan ( <i>Delegated Power</i> ) dan Pengawasan masyarakat ( <i>Citizen Control</i> ).	11		Saya dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata di desa.	2.68	3.22
	12		Keputusan pengembangan pariwisata dibuat bersama antara masyarakat dan pihak pengelola atau pemerintah.	3.15	
	13		Pemerintah atau pengelola pariwisata memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola aktivitas wisata secara mandiri.	3.35	
	14		Kegiatan pariwisata di desa ini dijalankan dan dikelola oleh lembaga masyarakat tanpa intervensi dari pihak luar.	3.63	
	15		Masyarakat memiliki wewenang penuh dalam menentukan arah dan prioritas pengembangan pariwisata di desa.	3.32	
	16		Pengelolaan daya tarik wisata di desa ini sepenuhnya berada di bawah kontrol masyarakat lokal.	3.19	

Sumber: Hasil Analisis Data Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil kuesioner, dimensi *Degrees of Citizen Power* mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat di mana warga mulai memiliki peran dalam pengambilan keputusan, kemitraan, serta pengelolaan destinasi wisata. Hasil kuesioner pada dimensi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata Pura Lempuyang berada pada kategori cukup, dengan rata-rata skor *Likert* sebesar 3,22. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai merasakan adanya pelibatan yang mengarah pada pembagian peran dan kewenangan dalam pengelolaan pariwisata, namun keterlibatan tersebut belum sepenuhnya merata dan belum mencerminkan penguasaan kendali oleh masyarakat secara luas.

#### a. Partnership

Indikator *partnership* menilai sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata. Pernyataan mengenai keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan memperoleh nilai rata-rata 2,68 yang berada pada kategori tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum secara konsisten merasakan keterlibatan langsung dalam keseluruhan proses pengembangan pariwisata.

Sementara itu, pernyataan mengenai keputusan pengembangan pariwisata yang dibuat bersama antara masyarakat dan pihak pengelola memperoleh nilai rata-rata 3,15 yang berada pada kategori cukup. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme kemitraan mulai terlihat, tetapi belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan posisi yang setara antara masyarakat dan pengelola.

#### b. Delegated Power

Indikator *delegated power* menilai sejauh mana kewenangan pengelolaan pariwisata diberikan kepada masyarakat. Pernyataan mengenai pemberian kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola aktivitas wisata secara mandiri memperoleh nilai rata-rata 3,35, sedangkan pernyataan mengenai pengelolaan kegiatan pariwisata oleh lembaga masyarakat tanpa intervensi pihak luar memperoleh nilai rata-rata 3,63. Nilai tersebut berada pada kategori cukup hingga setuju.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian kewenangan pengelolaan telah mulai diberikan kepada masyarakat, khususnya pada level operasional. Namun demikian, pendelegasian tersebut masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya memberikan kemandirian penuh, karena kontrol strategis tetap berada pada pihak pengelola utama.

#### c. Citizen Control

Indikator *citizen control* berkaitan dengan kewenangan penuh masyarakat dalam menentukan arah serta prioritas pengembangan pariwisata. Pernyataan mengenai kewenangan masyarakat dalam menentukan arah pengembangan pariwisata memperoleh nilai rata-rata 3,32, sedangkan pernyataan mengenai kontrol penuh pengelolaan daya tarik wisata oleh masyarakat lokal memperoleh nilai rata-rata 3,19. Kedua nilai tersebut berada pada kategori cukup.

Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memiliki kontrol penuh terhadap pengelolaan dan arah pengembangan pariwisata. Meskipun terdapat ruang partisipasi, peran masyarakat masih berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh struktur kelembagaan yang ada.

Secara keseluruhan, rerata skor *Likert* pada dimensi *Degrees of Citizen Power* sebesar 3,22 berada pada kategori cukup. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai merasakan adanya ruang keterlibatan yang lebih besar dalam pengelolaan pariwisata, meskipun peran tersebut masih terbatas pada kelompok atau kegiatan tertentu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Informan M3 sebagai berikut:

“Beberapa kegiatan wisata memang sudah mulai dikelola oleh masyarakat contohnya mereka membuat daya Tarik wisata lainnya di dekat pura lempuyang secara berkelompok 8-15 orang. Tetapi untuk keputusan besar biasanya tetap dibicarakan oleh pihak pengelola Sekaa Pemandu Banjar Purwayu.”  
(Wawancara, 18 Juli 2025)

Pernyataan tersebut memperkuat temuan kuesioner bahwa pembagian peran dan kewenangan dalam pengelolaan pariwisata mulai muncul, terutama pada aspek operasional dan pengembangan usaha pendukung. Namun demikian, kewenangan strategis masih terkonsentrasi pada struktur pengelola utama.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang menunjukkan bahwa posisi partisipasi masyarakat berada pada tangga *Informing* dalam teori tangga partisipasi Arnstein (1969), yang termasuk dalam kategori *Degrees of Tokenism*. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, dimensi *Degrees of Tokenism* memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,89 yang berada pada kategori setuju. Nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam proses pengembangan pariwisata, namun keterlibatan tersebut masih bersifat terbatas dan belum disertai dengan kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan indikator, aspek *informing* menunjukkan nilai rata-rata yang paling dominan, yaitu sebesar 4,04 dan 4,11, dibandingkan dengan indikator *consultation* dan *placation*. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat lebih banyak berada pada tahap penerimaan informasi dibandingkan dengan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa proses komunikasi masih bersifat satu arah dan keputusan strategis tetap ditentukan oleh pihak pengelola.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang telah melampaui tahap *non-participation*, namun masih berada pada tingkat *Informing*, di mana masyarakat memiliki akses terhadap informasi tetapi belum memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan. Kondisi ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya bersifat memberdayakan.

Hasil analisis terkait tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang ini menunjukkan perbedaan sekaligus keterkaitan dengan penelitian Wondirad & Ewnetu (2019) di wilayah Dinsho, Taman Nasional Bale Mountains, Ethiopia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat *non-participation*, di mana pelibatan masyarakat bersifat semu dan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pengelolaan pariwisata. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh peran aktor-aktor pengendali (*gatekeepers*) serta keterbatasan ekonomi masyarakat, sehingga partisipasi yang bersifat substansial sulit terwujud.

Dibandingkan dengan temuan di Pura Lempuyang, tingkat partisipasi masyarakat relatif lebih berkembang karena masyarakat telah dilibatkan dalam proses penyampaian informasi dan konsultasi, meskipun belum memiliki kontrol terhadap keputusan strategis. Selain itu, hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Indriani dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada tahap *placation*, yaitu salah satu bentuk *tokenism*, di mana masyarakat dilibatkan secara formal tetapi belum memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan.

### **Dampak Partisipasi Masyarakat Lokal**

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang tidak hanya tercermin dari bentuk dan tingkat keterlibatan dalam pengelolaan pariwisata, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat lokal. Dampak tersebut

terutama terlihat pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang seiring meningkatnya aktivitas pariwisata di kawasan Pura Lempuyang.

Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan jasa wisata, pengelolaan fasilitas, serta aktivitas pendukung lainnya mendorong terbukanya peluang usaha dan sumber pendapatan baru. Di sisi lain, interaksi yang semakin intens antara masyarakat lokal dan wisatawan turut memengaruhi dinamika sosial serta memperkuat kesadaran terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kesakralan pura.

Analisis dampak partisipasi masyarakat dalam penelitian ini mengacu pada kerangka *Community-Based Tourism* (CBT) yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pariwisata berpotensi memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat lokal. Dampak tersebut diidentifikasi melalui hasil wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi yang dianalisis secara tematik menggunakan perangkat lunak NVivo 14.

Hasil analisis NVivo menunjukkan kemunculan kata-kata dominan seperti usaha, pendapatan, ekonomi, sosial, adat, dan budaya, yang mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dimensi dampak yang bersifat multidimensional. Kata usaha dan pendapatan merefleksikan manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat dari keterlibatan dalam kegiatan pariwisata. Sementara itu, kemunculan kata budaya dan adat menunjukkan keterkaitan erat antara aktivitas pariwisata dengan pelestarian nilai tradisi dan identitas lokal.

Kata-kata seperti ‘usaha’, ‘pendapatan’, dan ‘ekonomi’ menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat juga memiliki dimensi ekonomi, di mana mereka memperoleh manfaat finansial dari partisipasi dalam kegiatan pariwisata. Selain itu, kata ‘kadang’ dan ‘terlibat’ menandakan bahwa partisipasi masyarakat dapat bersifat fleksibel, tidak selalu konsisten untuk setiap individu, tetapi secara kolektif mereka tetap menjalankan peran penting dalam keberlangsungan dan keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas.



Gambar 4. Word Frequency Query terkait Dampak Partisipasi Masyarakat

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

Visualisasi *word frequency* yang ditampilkan pada Gambar 4 di atas, dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dampak yang sangat erat dengan ‘budaya’ dan ‘adat’, karena keterlibatan masyarakat lokal seringkali menjaga nilai-nilai tradisi sekaligus menguatkan identitas sosial. Selain itu, partisipasi juga berkontribusi pada ‘usaha’, ‘ekonomi’ masyarakat, misalnya melalui warung, jualan, atau kegiatan ekonomi terbuka yang menambah ‘pendapatan’ dan penghasilan. Dari sisi ‘sosial’, masyarakat membangun kebersamaan dan solidaritas dalam menjalankan kegiatan. Di sisi lain, terdapat pula tantangan seperti keterbatasan peluang dan distribusi manfaat yang belum sepenuhnya merata di antara masyarakat.

Secara ekonomi, masyarakat memperoleh manfaat langsung berupa peningkatan pendapatan dari tiket dan layanan transportasi. Secara sosial dan budaya, partisipasi ini memperkuat identitas lokal dan menjaga kelestarian nilai-nilai adat serta spiritualitas Pura

Lempuyang. Selain itu, keterlibatan masyarakat turut meningkatkan kualitas pelayanan wisatawan dan memperkuat legitimasi pengelolaan oleh Banjar Dinas Purwayu, sehingga tercipta model pengelolaan pariwisata berbasis komunitas yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam mendorong pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang lebih berkelanjutan. Keterlibatan yang terstruktur tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi individu dan keluarga, tetapi juga memperkuat dimensi sosial, budaya, serta legitimasi pengelolaan oleh kelembagaan lokal.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dampak partisipasi masyarakat dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek utama, yaitu dampak ekonomi, sosial dan budaya.

**Tabel 5. Dampak Partisipasi Masyarakat**

Dampak	Dampak Positif	Dampak Negatif / Catatan
<b>Ekonomi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pendapatan dari penjualan makanan, minuman, oleh-oleh, dan jasa wisata.</li> <li>Terbukanya peluang usaha baru dan diversifikasi pekerjaan masyarakat.</li> <li>Sebagian masyarakat memperoleh penghasilan tetap melalui keterlibatan dalam organisasi pemandu wisata.</li> <li>Sebagian pendapatan wisata (tiket, <i>shuttle</i>) disalurkan untuk pemeliharaan pura, kegiatan keagamaan, dan fasilitas adat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribusi manfaat ekonomi belum merata, didominasi masyarakat Banjar Dinas Purwayu.</li> <li>Sebagian warga belum memiliki akses terhadap peluang usaha wisata.</li> <li>Pendapatan bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan dan bersifat fluktuatif.</li> <li>Persaingan usaha meningkat, sehingga tidak semua masyarakat mampu bertahan.</li> </ul>
<b>Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat menjadi lebih terbuka dan terbiasa berinteraksi dengan wisatawan.</li> <li>Terjadi penguatan solidaritas melalui kerja sama dalam kegiatan pariwisata dan gotong royong.</li> <li>Generasi muda memperoleh pengalaman dan keterampilan sosial baru. erbentuknya organisasi lokal (Sekaa pemandu) memperkuat koordinasi masyarakat dalam kegiatan wisata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketimpangan akses partisipasi antarbanjar berpotensi menimbulkan jarak sosial.</li> <li>Persaingan usaha dapat memicu hubungan sosial yang kurang harmonis.</li> <li>Sebagian masyarakat mulai lebih berorientasi pada aspek ekonomi dibandingkan kepentingan kolektif.</li> </ul>
<b>Budaya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tradisi dan kegiatan adat tetap terjaga karena pengelolaan wisata memperhatikan hari keagamaan.</li> <li>Partisipasi masyarakat, terutama anak muda sebagai pemandu, membantu transfer pengetahuan budaya dan norma lokal.</li> <li>Kesadaran masyarakat dalam menjaga kesakralan pura meningkat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi komersialisasi budaya apabila orientasi ekonomi menjadi dominan.</li> <li>Tekanan aktivitas wisata terhadap kesakralan pura jika tidak dikendalikan.</li> <li>Risiko pergeseran orientasi masyarakat terhadap budaya dari nilai spiritual menuju nilai ekonomi.</li> </ul>

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel 5, partisipasi masyarakat dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang memberikan dampak yang nyata terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal. Namun demikian, manfaat yang dihasilkan masih diiringi oleh ketimpangan akses, distribusi manfaat yang belum merata, serta dominasi kelembagaan pada kelompok tertentu.

Partisipasi masyarakat pada aspek ekonomi dalam pariwisata telah membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta menciptakan lapangan kerja yang berkaitan langsung dengan aktivitas wisata. Selain manfaat pada tingkat individu, aktivitas pariwisata juga memberikan kontribusi kolektif bagi kelembagaan adat, terutama dalam mendukung pemeliharaan pura, pelaksanaan upacara keagamaan, serta pengelolaan fasilitas kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai penopang keberlanjutan fungsi religius dan sosial masyarakat.

Partisipasi masyarakat pada aspek sosial mendorong peningkatan interaksi sosial, baik antar masyarakat lokal maupun dengan wisatawan. Masyarakat menjadi lebih terbuka, adaptif, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik, termasuk dalam berinteraksi dengan wisatawan mancanegara. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan pariwisata juga memperkuat solidaritas sosial melalui kerja sama dalam organisasi lokal serta kegiatan gotong royong. Namun demikian, dinamika sosial ini juga diiringi oleh potensi ketimpangan sosial, terutama akibat perbedaan akses terhadap peluang ekonomi, yang berpotensi menimbulkan jarak sosial antar kelompok masyarakat.

Sementara itu, dari aspek budaya, partisipasi masyarakat menunjukkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat dan tradisi lokal. Aktivitas pariwisata di Pura Lempuyang tetap memperhatikan norma dan aturan keagamaan, sehingga tidak mengganggu kesakralan pura. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pariwisata, seperti sebagai pemandu wisata, turut mendukung proses transfer pengetahuan budaya kepada wisatawan maupun antar generasi. Meskipun demikian, terdapat potensi tantangan berupa komersialisasi budaya serta pergeseran orientasi masyarakat dari nilai spiritual menuju nilai ekonomi apabila aktivitas pariwisata tidak dikelola secara bijaksana.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Rasoolimanesh, dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pariwisata mampu meningkatkan pendapatan, namun masih menghadapi keterbatasan dalam akses dan kapasitas masyarakat. Di sisi lain, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Suhandi, dkk. (2022), di mana partisipasi masyarakat dalam konteks Pura Lempuyang belum sepenuhnya merata dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, melainkan masih dominan pada tahap operasional dan pemanfaatan manfaat ekonomi.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang menunjukkan dinamika yang kompleks. Masyarakat telah memperoleh manfaat ekonomi serta penguatan sosial dan budaya, namun masih berada pada tingkat partisipasi yang terbatas sebagaimana dijelaskan dalam tangga partisipasi Arnstein (1969), yaitu pada tahap *Informing* yang termasuk dalam kategori *Degrees of Tokenism*.

Dalam perspektif *Community-Based Tourism* (CBT) menurut Suansri (2003), kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata telah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerataan manfaat dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas akses, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta mendorong keterlibatan yang lebih inklusif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan agar pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan Daya Tarik Wisata Pura Lempuyang, dapat ditarik beberapa simpulan utama yang mencakup bentuk partisipasi, tingkat keterlibatan, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat lokal.

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pura Lempuyang menunjukkan adanya keterlibatan dalam berbagai aspek, seperti pengelolaan kelembagaan, penyediaan layanan wisata, serta pemanfaatan peluang ekonomi. Namun, partisipasi

- tersebut cenderung terstruktur dan didominasi oleh kelompok tertentu, khususnya masyarakat Banjar Dinas Purwayu sebagai pengelola utama kawasan wisata.
2. Tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tangga partisipasi Arnstein (1969) berada pada tahap *Degrees of Tokenism*, dengan kecenderungan dominan pada tingkat *informing*. Masyarakat telah dilibatkan melalui penyampaian informasi dan konsultasi, namun belum memiliki kekuatan yang signifikan dalam pengambilan keputusan strategis. Meskipun terdapat indikasi menuju *Degrees of Citizen Power*, keterlibatan tersebut masih bersifat terbatas dan belum merata.
  3. Dampak partisipasi masyarakat terhadap kehidupan masyarakat lokal menunjukkan hasil yang beragam. Dari aspek ekonomi, pariwisata memberikan kontribusi nyata melalui peningkatan pendapatan, pembukaan peluang usaha, serta penciptaan lapangan kerja, meskipun manfaat tersebut belum sepenuhnya merata. Dari aspek sosial, partisipasi masyarakat meningkatkan interaksi sosial, keterbukaan terhadap wisatawan, serta memperkuat solidaritas masyarakat, namun juga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial. Sementara itu, dari aspek budaya, pariwisata tidak mengubah nilai-nilai tradisi yang ada, bahkan turut memperkuat pelestarian budaya lokal, meskipun terdapat potensi komersialisasi budaya apabila orientasi ekonomi menjadi lebih dominan.

## REFERENSI

- Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Aulia, S. A., Nara, N., & Djaing, H. (2024). *Tipologi partisipasi masyarakat dalam program desa wisata: Studi kasus Desa Timusu*. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 92–106. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v4i2.42171>
- Indriani, C., Asang, S., & Hans, A. (2021). *Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Pali, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja*. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 1(1), 57–67. <https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.18597>
- Kurniawati, D., Nugroho, I., & Harianto, O. (2018). *Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat*. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 5(2), 45–56.
- Parmita, N. P. D., Ardika, I. W., & Putra, I. N. D. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Tampaksiring, Gianyar*. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia*, 17(1), 88–101.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., & Tangit, T. M. (2018). *Community involvement in rural tourism: A case of Kinabalu National Park, Malaysia*. *Anatolia*, 29(3), 337–350. <https://doi.org/10.1080/13032917.2017.1412327>
- Riskayana. (2015). *Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat*. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 120–132.
- Rismayanti, P. R., Masdarini, L., & Suriani, N. M. (2020). *Identifikasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Bosaparis: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 11(2). <https://doi.org/10.23887/jjpk.v11i2.27397>
- Suansri, P. (2003). *Community based tourism handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour Project.
- Suhandi, A. S., Novianti, E., Oktavia, D., Khan, A. M., & Simatupang, W. P. (2022). *Community participation process in community-based tourism development in Waerebo Traditional Village, Manggarai Regency, Flores*. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 20(2), 67–82. <https://doi.org/10.5614/ajht.2022.20.2.05>

- Tikson, D. T. (2001). *Pembangunan berbasis masyarakat dan partisipasi publik*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Tosun, C. (1999). *Towards a typology of community participation in the tourism development process*. *Tourism Management*, 10(2), 113–126. <https://doi.org/10.1080/13032917.1999.9686975>
- Wardana, I. G., & Adikampana, I. M. (2018). *Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali*. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1), 78–84. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2018.v06.i01.p12>
- Wijana, P. G. (2019). *Analisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pura Puseh dan Pura Desa di Desa Batuan sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Gianyar, Bali*. *JOURNEY*, 2(1), 19–34. <https://doi.org/10.46837/journey.v2i1.41>